# POLA KONSUMSI DAN KETAHANA PANGAN MASYARAKAT SUMATERA SELATA (ANALISIS DATA SUSENAS)

*by* Saadah Y., M. Teguh, Imelda, Deassy Apriani

**Submission date:** 06-Jul-2021 11:23AM (UTC+0700)
**Submission ID:** 1616238762
**File name:** ANA_PANGAN_MASYARAKAT_SUMATERA_SELATA_ANALISIS_DATA_SUSENAS.pdf (3.02M)
**Word count:** 12193
**Character count:** 76480

# POLA KONSUMSI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT SUMATERA SELATAN (ANALISIS DATA SUSENAS)

ADAH YULIANA
MMAD TEGUH
IMELDA
EASSY APRIANI

UNSRI PRESS

# POLA KONSUMSI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT SUMATERA SELATAN (ANALISIS DATA SUSENAS)

**Sanksi pelanggaran Pasal 72**
**Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002**
**Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997**
**Pasal 44 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dendan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# POLA KONSUMSI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT SUMATERA SELATAN (ANALISIS DATA SUSENAS)

SA'ADAH YULIANA
M. TEGUH
IMELDA
DEASSY APRIANI

UNSRI PRESS

**POLA KONSUMSI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT SUMATERA SELATAN (ANALISIS DATA SUSENAS)**

**Sa'adah Yuliana**
**M. Teguh**
**Imelda**
**Deassy Apriani**

UPT. Penerbit dan Percetakan
Universitas Sriwijaya 2019
Kampus Unsri Palembang
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139
Telp. 0711-360969
email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com
website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 026/KTA/APPTI/X/2015
Anggota IKAPI No. 001/SMS/2009

Setting & Lay Out Isi : Maryati, A.Md
Cetakan Pertama, Desember 2019
78 halaman : 24 x 16 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

**ISBN :978 - 979 - 587 –838 - 4**

# KATA PENGANTAR

Pola konsumsi dan ketahanan pangan merupakan topik yang belum banyak dikaji di beberapa daerah di Indonesia. Konsumsi sebagai sebuah aktivitas guna memenuhi kebutuhan hidup penting untuk dikaji guna memperoleh gambaran tentang pola konsumsi yang ada di suatu daerah. Pola konsumsi masyarakat dibedakan antara konsumsi pangan dengan konsumsi non pangan. Ketahanan pangan merujuk pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pangan.

Buku dengan judul "Pola Konsumsi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Sumatera Selatan (Analisis Data Susenas)" merupakan karya lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan dengan tema yang sejenis.

Penulisan buku ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan bagi pihak-pihak pengambil kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan serta ketahanan pangan masyarakat Sumatera Selatan.

Penulisan buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan sangat Penulis harapkan

Desember 2019,

Tim Penulis,

# DAFTAR ISI


| | |
|---|---|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Khusus | 7 |
| 1.4 Urgensi Penelitian | 7 |
| 1.5 Spesifikasi Khusus Terkait Dengan Skema | 10 |
| BAB II | 13 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Landasan Teori | 13 |
| 2.1.1 Teori Perilaku Konsumsi | 13 |
| 2.1.2 Ketahanan Pangan | 16 |
| 2.1.3 Kemiskinan | 19 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 22 |
| 2.3 Kerangka Pikir | 27 |
| 2.4 Hipotesis | 29 |
| 2.5 Peta Jalan Penelitian | 29 |
| BAB III | 31 |
| METODE PENELITIAN | 31 |

3.1 Metode Penelitian 31
3.1.1 Ruang Lingkup Penelitian 31
3.1.2 Jenis dan Sumber Data 32
3.1.3 Teknik Analisis Data 32
3.1.4 Diagram Alur Penelitian 34
BAB IV 37
HASIL DAN PEMBAHASAN 37
4.1 Pola Konsumsi Masyarakat Sumatera Selatan 37
4.2 Ketahanan Pangan Masyarakat Sumatera Selatan 48
4.2.1 Karakteristik Rumah Tangga 48
4.3 Pembahasan 56
4.3.1. Pola Konsumsi Masyarakat Sumatera Selatan 56
4.3.2. Ketahanan Pangan Masyarakat Sumatera Selatan 58
BAB V 61
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 61
5.1 Kesimpulan 61
5.2 Rekomendasi 62
DAFTAR PUSTAKA 63

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1. 1 | Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan | 3 |
| Tabel 1. 2 | Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Sumatera Selatan Tahun 2014 | 7 |
| Tabel 1. 3 | Indikator Kemiskinan dan IPM Sumatera Selatan Tahun 2017 | 10 |
| Tabel 2. 1 | Pengukuran Derajat Ketahanan Pangan Rumah Tangga | 18 |
| Tabel 4. 1 | Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 | 40 |
| Tabel 4. 2 | Distribusi Rumah Tangga di Sumatera Selatan Berdasarkan Pangsa Pengeluaran Pangan dan Kecukupan Kalori | 49 |
| Tabel 4. 3 | Pengukuran Derajat Ketahanan Pangan Rumah Tangga | 50 |
| Tabel 4. 4 | Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Pengukuran Derajat Ketahanan Pangan Menurut Jhonson dan Toole | 50 |
| Tabel 4. 5 | Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendapatan | 52 |
| Tabel 4. 6 | Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Status Pekerjaan | 53 |
| Tabel 4. 7 | Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Usia Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin | 54 |
| Tabel 4. 8 | Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 55 |
| Tabel 4. 9 | Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Penerima atau Tidak Menerima Program Perlindungan Sosial | 56 |
| Tabel 4. 10 | Hasil Estimasi Regresi Berganda Model Tingkat Ketahanan Pangan | 58 |

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse 21

Gambar 2. 2 Alur Pikir 28

Gambar 2. 3 Peta Jalan Penelitian 30

Gambar 3. 1 Diagram Alur Penelitian 35

Gambar 4. 1 Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan Tahun 2010-2018 38

Gambar 4. 2 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Non Makanan Tahun 2010-2018 44

Gambar 4. 3 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Tahun 2010-2018 45

Gambar 4. 4 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Kesehatan Tahun 2010-2018 47

Gambar 4. 5 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Pendidikan Tahun 2010-2018 48

# 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan biasanya didefinisikan dengan sejauh mana individu berada di bawah tingkat standar hidup minimal masyarakat atau komunitasnya. Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Dalam banyak kasus, kemiskinan diukur dengan terminologi kesejahteraan ekonomi, seperti pendapatan dan konsumsi. Kemiskinan mengandung unsur ruang dan waktu. Konsep kemiskinan pada lima puluh tahun yang lalu, berbeda dengan konsep kemiskinan pada sepuluh tahun yang lalu, berbeda pula dengan konsep kemiskinan pada masa kini.

Nasikun (2002) membagi kemiskinan menjadi empat bentuk, yaitu: kemiskinan absolut; kemiskinan relative; kemiskinan kultural; dan kemiskinan struktural. (i) Kemiskinan absolut yakni apabila pendapatannya di bawah tingkat kemiskinan atau tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja, (ii) Kemiskinan relative merupakan kondisi miskin karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata atau menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan, (iii) Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, pemboros, malas, dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar, dan (iv) Kemiskinan struktural merupakan situasi dimana keadaan miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan menurut Assegaf (2015) perlu dilakukan dengan menggunakan berbagai perspektif, karena kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang mencakup kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, kemiskinan juga merupakan masalah utama yang terjadi di setiap negara dan daerah.

Program pengentasan kemiskinan di Simatera Selatan belum mencapai hasil yang optimal, hal ini ditunjukkan oleh angka kemiskinan yang masih relatif tinggi. Beberapa kebijakan yang ditujukan untuk menekankan angka kemiskinan, justru lebih

berorientasi pada peninggkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi.

Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami fluktuasi di setiap tahunnya, pada tahun 2010-2012 jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan mengalami penurunan. Namun pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan kembali mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 penduduk miskin di Sumatera Selatan mengalami penurunan kembali. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan di Sumatera Selatan masih relatif rendah.

Badan Pusat Statitisk (BPS) mendefenisikan kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (*BPS*, 2016). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017* (BPS, 2017) menunjukkan bahwa konsumsi utama pada rumah tangga miskin yaitu konsumsi pangan. Dengan perkataan lain, rumah tangga miskin lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan dibandingkan nonpangan. Oleh karena itu, konsumsi pangan yaitu makanan sangat berkaitan dengan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan Engel (1857), kesejahteraan rumah tangga dapat dicerminkan oleh struktur pengeluaran konsumsi pangan, bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga, maka semakin rendah persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan (Mankiw, 2007). Demikian pula dengan pernyataan Deaton dan Muelbauer (1980) bahwa semakin tinggi kesejahteraan masyarakat maka proporsi pengeluaran pangannya akan semakin kecil, dan sebaliknya (Deaton dan Dreze, 2010).

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan**

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | Jumlah Penduduk Miskin (%) |
|---|---|---|
| 2010 | 1.105,00 | 14,80 |
| 2011 | 1.061,87 | 13,95 |
| 2012 | 1.043,04 | 13,48 |
| 2013 | 1.104,62 | 14,06 |
| 2014 | 1.085,80 | 13,62 |
| 2015 | 1.112,53 | 13,77 |
| 2016 | 1.101,19 | 13,54 |
| 2017 | 1.008,92 | 13,19 |

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Sumatera Selatan, 2018

Selain menggambarkan kesejahteraan, menurut Ilham dan Bonar (2007), besarnya proporsi pengeluaran pangan juga dapat digunakan menjadi indikator ketahanan pangan. Semakin besar proporsi pengeluaran dialokasikan untuk pangan mengindikasikan ketahanan pangan yang semakin berkurang. Berdasarkan teori-teori tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terdapat indikasi peningkatan kesejahteraan pada masyarakat di Indonesia. Data pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia tahun 2016 (BPS, 2016) menunjukkan persentase rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut daerah tempat tinggal, dapat diketahui bahwa proporsi pengeluaran konsumsi makanan di wilayah perkotaan dan perdesaan sebesar 48,48 persen dan non makanan 51,32 persen, untuk

wilayah perkotaan sebesar 44,57 persen porsi pengeluaran makanan dan 55,43 persen porsi pengeluaran non makanan, sedangkan wilayah perdesaan menunjukkan masih lebih besarnya porsi pengeluaran makanan yaitu 55,83% dibandingkan non makanan sebesar 44,17%. Studi lainnya yang menggambarkan pola konsumsi pangan dengan membandingkan menurut tipologi wilayah antara lain antarkepulauan dalam penelitian Pangaribowo dan Tsegai (2011) dan Widarjono (2013); antarwilayah perdesaan dan perkotaan oleh Sari (2016), Sundari dan Djalal (2015) dan Faharudin (2015).

Ketahanan pangan tidak hanya berhubungan dengan kemiskinan tapi juga dengan kualitas sumber daya manusia. Latuconsina (2017) dan Bhakti (2014) menunjukkan keterkaitan antara proporsi konsumsi pangan dengan pembangunan manusia di suatu daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsumsi pangan rumah tangga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung Teori Engel, bahwa semakin rendah proporsi konsumsi pangan rumah tangga, maka tingkat kesejahteraannya semakin membaik.

Sudi ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Studi-studi yang membahas pengaruh dari karakteristik rumah tangga terhadap ketahanan pangan antara lain dilakukan oleh Mayasari, Satria, dan Noor (2018) yang menyimpulkan bahwa karakteristik sosial ekonomi memiliki andil yang besar dalam menentukan pola konsumsi

pangan rumah tangga di Jawa Timur. Demikian pula dengan studi dari Noor dan Satria (2018) di Jawa Timur, Rini, Sugiharti dan Airlangga (2016) di Indonesia dan Sari (2016) di Kalimantan Timur.

Sundari dan Djalal (2015) menjelaskan tentang determinan ketahanan pangan berdasarkan data yang tersedia pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2011 terdiri dari (a) *food availabili- ty* yaitu penerimaan Raskin *(food aid)* yang menggambarkan variabel ketersediaan pangan dalam rumah tangga dan juga menjadi variabel intervensi penguatan ketahanan pangan; (b) *stability* yaitu jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) dan pekerjaan Kepala Rumah Tangga (KRT) yang menggambarkan kestabilan ketahanan pangan rumah tangga; dan (c) *access to food* yaitu pendapatan, daerah tempat tinggal, gender KRT, pendidikan KRT, dan umur KRT yang menggambarkan kemampuan akses terhadap pangan. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, pada rumah tangga di perkotaan, semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga, maka akan meningkat pula ketahanan pangannya jika jumlah anggota rumah tangga kecil, pekerjaan kepala rumah tangga di non-pertanian, dan pendapatan per kapita besar. Kedua, secara umum, program raskin relatif tepat sasaran. Ketiga, raskin sebaiknya diprioritaskan pada rumah tangga yang dikepalai perempuan, berpendidikan dasar, dan bekerja di pertanian maupun non-pertanian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Bagaimana pola konsumsi masyarakat Sumatera Selatan ?
- Apakah pengaruh dari karakteristik sosial ekonomi rumah tangga miskin yaitu ketersediaan pangan, kestabilan ketahanan pangan, dan kemampuan akses pangan terhadap ketahanan pangan rumah tangga?

## 1.3 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian ini adalah menyediakan informasi mengenai pola konsumsi dan peta ketahanan pangan di Sumatera Selatan. Selain itu menganalisis karakteristik social ekonomi rumah tangga miskin yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga.

Secara khusus tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola konsumsi dan mengevaluasi ketahanan pangan masyarakat dalam hubungannya dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan tingkat regional dan kebijakan pengentasan kemiskinan, khususnya kebijakan bantuan sosial yaitu Program Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra), Kartu perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan.

## 1.4 Urgensi Penelitian

Merujuk pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3, maka penelitian ini menjadi penting mengingat sampai dengan tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan masih sebanyak 1.086.920 jiwa

atau sebesar 13,19 persen. Jumlah rumah tangga miskin penerima Raskin/Rastra sebesar 53,40 persen, hal ini menunjukkan masih besarnya penerima Raskin/Rastra. Pada semua golongan pengeluaran rumah tangga (kecuali rumah tangga dengan pengeluaran lebih dari Rp. 1.000.000 per kapita) menunjukkan bahwa masih dominannya pengeluaran untuk kelompok barang makanan. Dengan perkataan lain kondisi ini memperlihatkan bahwa Rumah Tangga masih tergolong ke dalam rentan dan rawan pangan.

Pola konsumsi menggambarkan besarnya persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan masyarakat Sumatera Selatan untuk makanan dan non makanan, baik meliputi konsumsi bukan makanan (perkotaan dan perdesaan), maupun konsumsi makanan (perkotaan dan perdesaan).

Konsep ketahanan pangan dalam penelitian menggambarkan kondisi pangan pada tingkatan rumah tangga. Konsep ketahanan pangan tersebut intinya bertujuan untuk mewujudkan situasi terjaminnya ketersediaan pangan. Oleh karena itu, penting untuk diteliti faktor-faktor karakteristik rumah tangga yang mempengaruhi ketahanan pangan. Demikian pula dapat dilihat hubungan program Raskin dan derajat ketahanan pangan rumah tangga. Hal ini penting agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan derajat ketahanan pangan rumah tangga sehingga dapat dilihat dalam kondisi seperti apa rumah tangga semakin tahan pangan. Oleh karena itu, diharapkan Program Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra), Kartu perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan dapat dialokasikan

kepada rumah tangga dengan lebih tepat.

**Tabel 1. 2 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Sumatera Selatan Tahun 2014**

| Golongan Pengeluaran | Kelompok Barang | | |
|---|---|---|---|
| | Makanan | Bukan Makanan | Jumlah |
| < 100.000 | - | - | - |
| 100.000 – 149.000 | 95.310 | 35.624 | 130.934 |
| 150.000 – 199.000 | 123.680 | 57.533 | 181.214 |
| 200.000 – 299.000 | 178.012 | 84.149 | 262.160 |
| 300.000 – 499.000 | 261.525 | 129.854 | 391.379 |
| 500.000 – 749.000 | 389.486 | 229.198 | 618.684 |
| 750.000 – 999.000 | 503.393 | 355.795 | 859.188 |
| 1.000.000 | 769.710 | 1.132.855 | 1.902.566 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 (diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan bagi rumah tangga dengan golongan pengeluaran kurang dari Rp 1 juta sebanyak lebih dari 50 persen digunakan untuk pengeluaran makanan, sedangkan sisanya digunakan untuk pngeluaran bukan makanan. Rumah tangga dengan golongan pengeluaran Rp 100 ribu – Rp 149 ribu sebanyak 72 persen digunakan untuk pengeluaran makanan; golongan pengeluaran Rp 150 ribu – Rp 199 ribu sebanyak 68 persen untuk pengeluaran makanan; golongan pengeluaran Rp 200 ribu – Rp 299 ribu sebanyak 68 persen untuk pengeluaran makanan;

golongan pengeluaran Rp 300 ribu – Rp 400 ribu sebanyak 67 persen untuk pengeluaran makanan; golongan pengeluaran Rp 500 ribu – Rp 749 ribu sebanyak 63 persen untuk pengeluaran makanan, serta rumah tangga dengan golongan pengeluaran Rp 750 ribu – Rp 999 ribu sebanyak 59 persen untuk pengeluaran makanan, sisanya sebesar 41 persen digunakan untuk pengeluaran bukan makanan. Fenomena ini menunjukkan masih dominannya pengeluaran untuk kelompok makanan, dan sekaligus memperlihatkan bahwa rumah tangga masih tergolong ke dalam rentan pangan dan rawan pangan.

**Tabel 1. 3 Indikator Kemiskinan dan IPM Sumatera Selatan Tahun 2017**

| Jumlah Penduduk Miskin | Persentase Penduduk Miskin | P1 | P2 | Garis Kemiskinan | IPM | RT Penerima Raskin/ Rastra (%) | Rata-rata Raskin / Rastra (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.086.920 | 13,19 | 2,24 | 0,60 | 370.060 | 68,86 | 53,40 | 8,39 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (diolah)

Beberapa indikator kemiskinan pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.3 antara lain jumlah penduduk miskin sebanyak 1.086.920 jiwa atau 13,19 persen dari jumlah penduduk; angka Indeks Pembanguan Manusia (IPM) yang sebesar 68,86; serta rumah tangga yang menjadi penerima program beras miskin sebanyak 53,4 persen.

### 1.5 Spesifikasi Khusus Terkait Dengan Skema

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menyusun kebijakan ketahahan pangan. dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini mendukung pencapaian salah satu pilar pada arah pengembangan penelitian Riset Unggulan Insititusi Penelitian yang ditetapkan pada Renstra dan peta jalan *(Roadmap)* dan Rencana Induk Penelitian Universitas Sriwijaya yaitu bertujuan mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat termasuk dalam penelitian dengan tema *kajian penguatan modal sosial* dengan topik *pengentasan kemiskinan dan kemandirian pangan*. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat miskin khususnya pada ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga khususnya rumah tangga miskin.

# 2

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Landasan Teori

### 2.1.1 Teori Perilaku Konsumsi

Konsumsi terdiri dari konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga atau masyarakat (Rahardja dan Manurung, 2004). Diantara keduanya, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam total pengeluaran agregat. Sukirno (2006) menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan jumlah nilai belanja rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam waktu tertentu. Pendapatan yang diperoleh rumah tangga dipergunakan untuk mengonsumsi barang dan jasa seperti membeli makanan, membiayai jasa angkutan, membayar pendidikan anak dan lainya.

Barang-barang yang diproduksi khusus untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi. Barang-barang konsumsi dibedakan kepada tiga golongan yaitu barang mudah rusak, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan; barang setengah tahan lama (*semi–durable goods*), seperti sepatu dan pakaian; barang tahan lama (*durable goods*) yaitu, seperti mobil, motor dan televisi (Sukirno, 2006).

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat menyebabkan perilaku-perilaku konsumsi juga cepat berubah. Masykur (2015) menyatakan bahwa konsumsi pemerintah bersifat eksogenus, sedangkan konsumsi rumah tangga bersifat endogenus. Dengan demikian, besarnya konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan faktor-faktor lain yang dianggap mempengaruhinya.

Pada dasarnya, faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah pendapatan, yaitu korelasi keduanya bersifat positif, jika semakin tinggi tingkat pendapatan (Y), maka konsumsinya (C) juga makin tinggi. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut (Huda, 2008):

$$C = a + bY$$

C = Pengeluaran konsumsi rumah tangga,

a = Konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau konsumsi jika tidak ada pendapatan,

b = Hasrat marginal masyarakat untuk melakukan konsumsi,

Y = Pendapatan *disposible* (pendapatan yang siap dikonsumsi) $a > 0$ dan $0 < b < 1$.

Secara umum pendapatan rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan. Salah satu teori ekonomi yang menghubungkan pengeluaran konsumsi dengan pendapatan dinyatakan oleh Ernst Engel pada tahun 1853 di Belgia. Engel's Law menyimpulkan bahwa proporsi pengeluaran untuk pangan menurun jika pendapatan masyarakat bertambah. Dari studi perbandingan antar negara menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat di negara berkembang membelanjakan presentase pendapatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan persentase pengeluaran pendapatan untuk bahan pangan di negara maju. Lebih lanjut, analisa kurun waktu menunjukkan bahwa persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk pangan cenderung turun jika pendapatan semakin meningkat. Banyak pakar yang menganjurkan untuk menggunakan proporsi pengeluaran pangan sebagai indikator kemiskinan (Nicholson, 1994) .

Menurut Teori Konsumsi Keynes, konsumsi saat ini (*current consumption)* sangat dipengaruhi oleh pendapatan *disposabel* saat ini (*current disposible income*). Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi, walaupun tingkat pendapatan adalah nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus (*autonomous consumption*). Jika pendapatan disposabel meningkat, maka konsumsi juga meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan *disposible* (Rahardja dan Manurung, 2004). Kecenderungan Mengkonsumsi Marjinal (*Marginal Propensity to Consume=MPC*) merupakan konsep yang memberikan gambaran tentang berapa konsumsi bertambah bila pendapatan *disposible* bertambah satu unit.

Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal (*Marginal Prospensity to Consume)* yaitu besarnya jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah krusial bagi rekomendasi kebijakan Keynes untuk menurunkan pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan oleh pengganda kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara pendapatan dan konsumsi (Mankiw, 2003).

Rahardja dan Manurung (2004) mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi menjadi tiga besar yaitu ekonomi, demografi (kependudukan), dan non-ekonomi. Faktor ekonomi yaitu pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat bunga, perkiraan tentang masa depan. Faktor demografi yaitu jumlah penduduk, dan komposisi penduduk menurut usia (produktif atau tidak produktif), pendidikan (rendah, menengah, tinggi), wilayah tinggal (perkotaan atau perdesaan). Faktor non-ekonomi adalah sosial budaya, antara lain perubahan kebiasaan, etika, dan tata nilai.

### 2.1.2 Ketahanan Pangan

Konsumsi pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan dijamin oleh negara karena pangan dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki dan hal mutlak yang harus dipenuhi. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 mengenai Pangan menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang bagi perseorangan, baik pada tingkat nasional maupun daerah secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Jonsson dan Toole (1991) dalam Maxwell et all. (2000) mengklasifikasikan ketahanan pangan rumah tangga melalui perpaduan dua indikator ketahanan pangan yaitu ketercukupan pangan dan pangsa pengeluaran pangan. Menurut Sundari & Djalal (2015), kedua indikator tersebut dapat merepresentasikan tingkat ketahanan pangan rumah tangga dengan baik.

**Tabel 2. 1 Pengukuran Derajat Ketahanan Pangan Rumah Tangga**

| **Ketercukupan Kalori** | **Pangsa Pengeluaran Pangan** | |
|---|---|---|
| | **Rendah (<60%)** | **Tinggi (>60%)** |
| **Cukup (>80%)** | Tahan Pangan (Kategori 3) | Rentan Pangan (Kategori 2) |
| **Kurang (<80%)** | Kurang Pangan (Kategori 1) | Rawan Pangan (Kategori 0) |

Sumber: Jonsson dan Toole (1991) dalam (Maxwell et all., 2000)

Ketercukupan pangan diidentifikasi dari indikator ketercukupan kalori yang dikonsumsi dan menggambarkan produktivitas sumberdaya manusia. Batas 100 persen ketercukupan kalori adalah 2.000 kkal/kapita/hari. Rumah tangga dikatakan cukup kalori jika konsumsi kalori per kapita rumah tangga lebih dari 80 persen (lebih dari 1.600 kkal /kapita/hari). Rumah tangga dikatakan kurang kalori jika konsumsi kalori per kapita rumah tangga kurang dari atau sama dengan 80 persen (kurang dari 1.600 kkal/kapita/hari). Pangsa pengeluaran pangan merupakan rasio pengeluaran untuk belanja pangan dan pengeluaran total rumah tangga selama sebulan. Pangsa pengeluaran pangan menggambarkan kemampuan daya beli. Pangsa pengeluaran pangan dikatakan rendah jika kurang 60 persen dan dikatakan tinggi jika lebih dari 60 persen. Kedua kategori dari masing-masing indikator tersebut disilangkan sehingga menghasilkan empat kategori derajat ketahanan pangan rumah tangga yaitu rumah tangga tahan pangan (kategori 3),

rentan pangan (kategori 2), kurang pangan (kategori 1), dan rawan pangan (kategori 0).

Pangsa pengeluaran pangan dihitung dari rasio antara pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga. Rasio pangsa pengeluaran pangan dapat dirumuskan:

$$PPP_i = \frac{PP_i}{TP_i}$$

PPPi menunjukkan pangsa pengeluaran pangan ke-i, PP menunjukkan pengeluaran pangan ke-i dan TP menunjukkan total pengeluaran pangan rumah tangga.

### 2.1.3 Kemiskinan

*Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016*, (BPS, 2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup standar minimum. Kebutuhan hidup standar minimum digambarkan oleh garis kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Batas pemenuhan kebutuhan minimum yaitu mengacu pada rekomendasi Widya Karya Nasional dan Gizi pada tahun 1978, yaitu nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi sebesar 2.100 kilo kalori per orang setiap harinya. Sedangkan kebutuhan non pangan mencakup pengeluaran untuk perumahan, pengeluaran penerangan, pengeluaran bahan bakar, pengeluaran pakaian, pengeluaran

pendidikan, pengeluaran kesehatan, pengeluaran transportasi, pengeluaran barang-barang tahan lama serta pengeluaran barang dan jasa esensial lainnya.

Berikut ini perhitungan Indikator kemiskinan menurut *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016* (BPS, 2016): Langkah pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS adalah GK periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini, langkah kedua adalah menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Langkah selanjutnya, harga implisit rata-rata kalori tersebut dikalikan dengan 2100. GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditikomoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini, nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas konsumsi pengeluaran. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004). SPKKD 2004 dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang

lebih rinci dibandingkan data Susenas konsumsi pengeluaran. GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu menghitung indikator kemiskinan tingkat provinsi.

Kuncoro (2010) mendefenisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dalam hal pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua elemen yaitu: 1) Pengeluaran yang dilakukan untuk gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; 2) Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Subandi (2016) menyatakan penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran kemiskinan merupakan suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik.

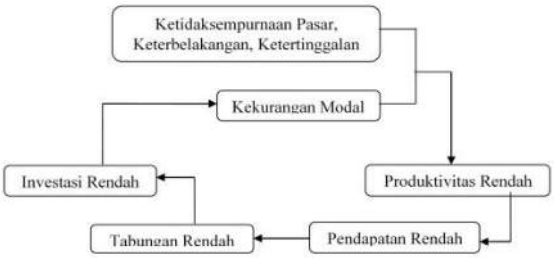


Sumber: Subandi, 2016

**Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse**

Adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertingalan, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas suatu negara/ wilayah tertentu. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya investasi dan tabungan masyarakat. Rendahnya investasi ini akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.

Shrap et.al (dalam Lincoln, 2010) mengidentifikasi tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu: a) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya dan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang; b) Kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia; c) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang membahas tentang ketahanan pangan dan pola konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain diteliti oleh Abdillah, Wiyono, Samudro (2019) yang membahas hubungan tipologi wilayah terhadap pola konsumsi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pola konsumsi makanan di perkotaan cenderung lebih rendah dibandingkan perdesaan. Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi rank Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara persentase penduduk miskin dengan konsumsi perkapita penduduk. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi konsumsi suatu wilayah maka diasumsikan semakin makmur penduduk wilayah tersebut (pendapatan tinggi). Demikian pula hasil

penelitian Wuryandari (2015) menyimpulkan bahwa rumah tangga yang berada di perkotaan memiliki proporsi pengeluaran paling besar untuk pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan dan pengeluaran makanan. Ditemukan pula bahwa rumah tangga yang memiliki proporsi pengeluaran makanan terbesar tetapi pengeluaran pendidikan dan kesehatannya terkecil adalah rumah tangga yang KRTnya bekerja sebagai pekerja mandiri. Selain itu, temuan lainnya yaitu tahapan siklus hidup rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga berpengaruh secara konsisten terhadap proporsi pengeluaran makanan, total pengeluaran pendidikan, dan total pengeluaran kesehatan; semakin banyak jumlah anggota rumah tangga meningkatkan proporsi pengeluaran makanan, pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Rumah tangga anak dan rumah tangga tiga generasi berikutnya berpengaruh paling besar terhadap masing-masing untuk pengeluaran pendidikan dan kesehatan.

Penelitian tentang pola konsumsi pangan rumah tangga miskin di Jawa Timur (Noor dan Satria, 2018) menyimpulkan karakteristik sosial ekonomi relatif berpengaruh terhadap pola konsumsi pangan rumah tangga miskin dan berdasarkan nilai elastisitasnya, komoditas pangan tidak elastis dalam harga atau kebutuhan dasar bagi rumah tangga miskin di Jawa Timur dan elastisitas pendapatan menunjukkan tidak ada barang inferior yang ditemukan pada rumah tangga miskin di Jawa Timur. Penelitian Mayasari et al. (2018) menyimpulkan karakteristik sosial ekonomi memiliki andil yang besar dalam menentukan pola konsumsi pangan rumah tangga dan berdasarkan nilai elastisitasnya, komoditas pangan

di Jawa Timur bersifat inelastis terhadap harga dan lebih responsif terhadap perubahan pendapatan.

Analisis pola konsumsi pangan daerah perkotaan dan pedesaan serta keterkaitannya dengan karakteristik sosial ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur (Sari, 2015) menyimpulkan secara umum, harga komoditas berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsumsi kelompok komoditas, walaupun ada beberapa variabel yang tidak signifikan. Proxy pendapatan untuk pengeluaran umum semuanya secara signifikan mempengaruhi tingkat konsumsi kelompok komoditas pangan. Secara umum, pengaruh karakteristik sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsumsi, walaupun ada beberapa yang tidak signifikan. Usia kepala rumah tangga dan jumlah keluarga tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga. Semua kelompok komoditas pada umumnya adalah barang normal dan hampir semua kelompok komoditas termasuk dalam kategori barang kebutuhan, kecuali kelompok makanan sayuran/buah-buahan dan kelompok rokok dianggap sebagai barang mewah.

Penelitian di Kota Langsa (Iskandar, 2017) dan Aceh Barat (Masykur, Syechalad, dan Nasir, 2015) menyimpulkan pendapatan rumah tangga ($Y_{RT}$) dan jumlah anggota rumah tangga (ART) yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin, sedangkan variabel tingkat pendidikan kepala rumah tangga (PRT) tidak berpengaruh signifikan. Penelitian di Bireun (Etavianti, Sechalad, Syahnur, 2014) menyimpulkan pendapatan, umur dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pengeluaran konsumsi kesehatan rumah tangga masyarakat miskin.

Penelitian Sundari & Djalal (2015) membahas pengaruh program Raskin dan kaitannya dengan ketahahanan pangan menyimpulkan bahwa tingkat Pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh positif pada peningkatan ketahanan pangannya jika jumlah anggota rumah tangga kecil, pekerjaan kepala rumah tangga di non-pertanian, pendapatan per kapita besar, dan daerah tempat tinggal di perkotaan. Secara umum, Raskin relatif tepat sasaran. Raskin sebaiknya diprioritaskan pada rumah tangga yang dikepalai perempuan, berpendidikan dasar, dan bekerja di pertanian maupun non-pertanian.

Penelitian yang khusus menganalisis pola konsumsi pangan di Sumatera Selatan 2013 dengan menggunakan pendekatan *Quadratic Almost Ideal Demand System* (Faharuddin, dkk, 2015) menyimpulkan bahwa semua kelompok pangan memiliki elastisitas pendapatan yang positif dan elastistas harga yang negative. Hasil ini konsisten dengan teori permintaan, namun elastisitas pengeluaran lebih tinggi dibandingkan elastisitas harga. Beras yang merupakan kebutuhan pokok dan komoditas pangan utama memiliki elastisitas pengeluaran dan elastisitas harga yang rendah, sehingga kenaikan pendapatan dan kenaikan harga tidak banyak memengaruhi konsumsi beras. Sebagian besar kelompok komoditas pangan memiliki elastisitas harga tidak terkompensasi yang mendekati 1, yaitu antara 0,9 dan 1,1. Elastisitas harga yang tinggi terdapat pada kelompok komoditas buah-buahan terutama karena dipengaruhi oleh faktor musiman. Penelitian tentang konsumsi beras diteliti oleh Bashir dan

Yuliana (2018) menyimpulkan konsumsi beras dipengaruhi oleh modal manusia, pendapatan per kapita, populasi, dan konsumsi tahun sebelumnya, dan di sisi lain, harga beras tidak mempengaruhi konsumsi beras di Indonesia.

Penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya oleh Rini et al., (2016) membahas berdasarkan pemetaan kemiskinan. Dalam hal ini, provinsi di Indonesia dibagi menjadi empat kuadran, data yang dianalisis adalah data tahun 2007 dan 2012, hasilnya menunjukkan perubahan posisi kuadran dari beberapa provinsi. Ada provinsi yang menjadi lebih baik, yaitu Jawa Tengah dan Maluku sementara Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan menunjukkan kondisi yang lebih buruk. Analisis penentu ukuran kemiskinan kemungkinan rumah tangga menjadi miskin menggunakan model regresi logit menemukan bahwa karakteristik rumah tangga menyukai jenis kelamin kepala rumah tangga, usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga, akses ke kredit, pendidikan kepala rumah tangga, akses teknologi informasi dan komunikasi, dan lokasi (pedesaan / perkotaan) secara signifikan mempengaruhi status rumah tangga yang buruk di Indonesia. Sedangkan Wulandari, Harafah, Saenong (2016) meneliti di Kendari menyimpulkan karakteristik kemiskinan Rumah Tangga adalah migran, pria, usia di bawah 60 tahun, jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang, tingkat pendidikan kurang dari sekolah menengah, dan bekerja di sektor formal dan sektor informal. Semua variabel yang diselidiki termasuk status migrasi, jenis kelamin kepala rumah tangga, usia kepala rumah tangga, jumlah anggota keluarga,

tingkat pendidikan kepala rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga, signifikan berpengaruh pada kemiskinan rumah tangga.

## 2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini mengikuti determinan ketahanan pangan menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yaitu (a) *food availability* yaitu penerima bantuan social khususnya Raskin *(food aid)* yang menggambarkan variabel ketersediaan pangan dalam rumah tangga dan juga menjadi variabel intervensi penguatan ketahanan pangan; (b) *stability* yaitu jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) dan pekerjaan Kepala Rumah Tangga (KRT) yang menggambarkan kestabilan ketahanan pangan rumah tangga; dan (c) *access to food* yaitu pendapatan, daerah tempat tinggal, gender KRT, pendidikan KRT, dan umur KRT yang menggambarkan kemampuan akses terhadap pangan.

Variable pendapatan, pendidikan dan umur kepala rumah tangga memiliki pengaruh positif terhadap ketahanan pangan, dengan kata lain jika pendapatan rumah tangga meningkat, tingkat pendidikan semakin tinggi dan semakin berusia kepala rumah tangga maka akan semakin tinggi ketahanan pangannya. Sedangkan jumlah tanggungan berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan, sehingga rumah tangga yang memiliki jumlah tanggungan lebih sedikit maka kestabilan ketahanan pangan menjadi lebih tinggi, akibatnya ketahanan pangan rumah tangga lebih tinggi pula.

Rumah tangga yang memperoleh bantuan sosial berupa program raskin akan semakin meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangganya sehingga ketahanan pangan lebih tinggi. Oleh karena itu terdapat perbedaan pengaruh antara rumah tangga yang memperoleh bantuan sosial dengan yang tidak memperoleh bantuan sosial. Demikian pula terdapat perbedaan pengaruh antara kepala rumah tangga laki-laki dengan perempuan terhadap ketahanan rumah tangga. Laki-laki dianggap lebih memiliki kemampuan akses terhadap pangan sehingga, jika kepala rumah tangga adalah laki-laki, maka ketahanan pangan rumah tangga mejadi lebih tinggi. Tipologi wilayah antara perkotaan dan perdesaan juga berbeda pengaruhnya terhadap kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan. Rumah tangga yang tinggal di kawasan perkotaan lebih mudah mengakses pangan sehingga ketahanan pangannya lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tinggal di kawasan perdesaan.

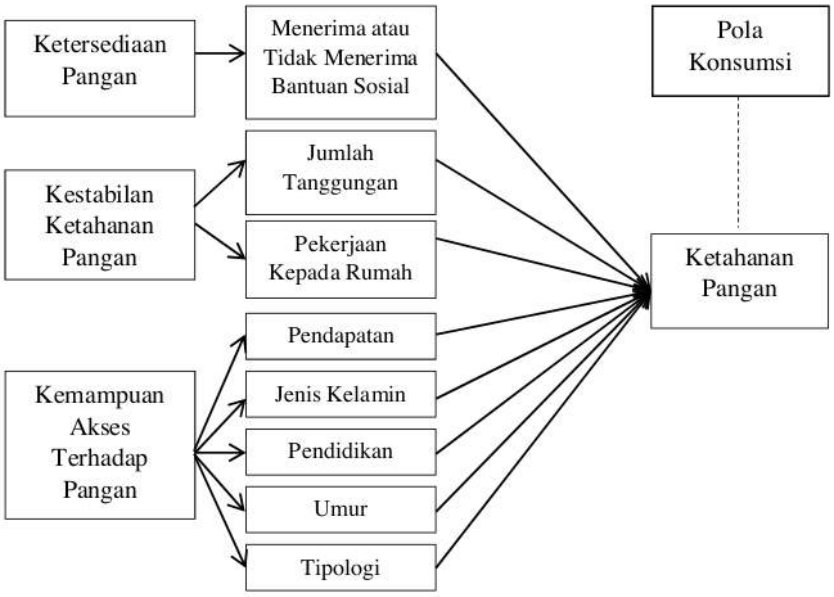


**Gambar 2.2 Alur Pikir**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah

- Pola konsumsi masyarakat Sumatera Selatan di daerah perkotaan didominasi oleh pengeluaran non makanan, sedangkan di daerah perdesaan didominasi oleh pengeluaran makanan
- ketahanan pangan, kestabilan pangan dan kemampuan akses terhadap pangan berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Selain itu, terdapat perbedaan pengaruh antara rumah tangga yang memperoleh dan tidak memperoleh bantuan sosial dan rumah tangga yang tinggal di kawasan perkotaan dan perdesaan terhadap ketahanan pangan rumah tangganya.

## 2.5 Peta Jalan Penelitian

Kelompok peneliti terdiri dari dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang mengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Regional dan Ekonomi Perkotaan, Ekonomi Industri serta Ekonomi Perdesaan. *Road map* penelitian disajikan pada Gambar 2.3

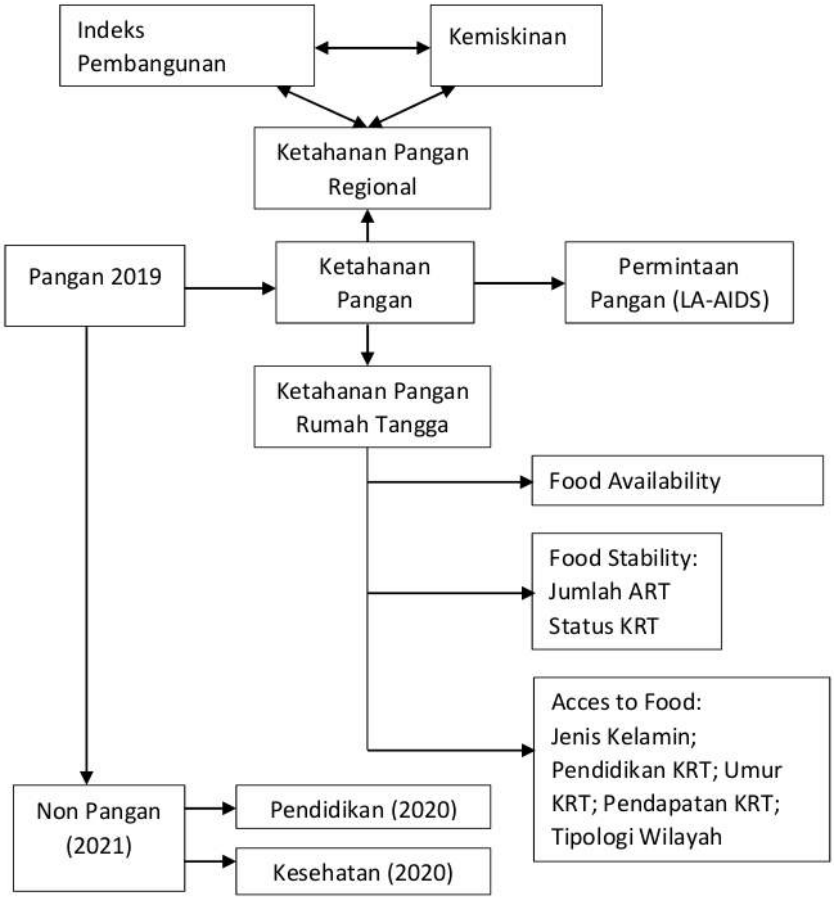


**Gambar 2.3 Peta Jalan Penelitian**

# 3

# METODE PENELITIAN

## 3.1 Metode Penelitian

### 3.1.1 Ruang Lingkup Penelitian

Pokok bahasan dalam penelitian mencakup analisis tentang pola konsumsi masyarakat Sumatera Selatan serta pengaruh karakteristik sosial ekonomi rumah tangga di Sumatera Selatan terhadap ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Variabel ketahanan pangan diukur dari proporsi pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga. Karakteristik sosial ekonomi menggambarkan: pertama, stabilitas ketahanan pangan *(stability)* meliputi variabel jumlah anggota rumah tangga dan pekerjaan kepala rumah tangga; kedua, ketersediaan pangan dalam rumah tangga *(food availability)* yaitu rumah tangga penerima Bantuan Sosial Raskin *(food aid)*; serta ketiga, kemampuan untuk mengakses terhadap pangan *(acces to food)*

meliputi variabel jenis kelamin, pendidikan kepala rumah tangga, umur kepala rumah tangga, pendapatan kepala rumah tangga dan daerah tempat tinggal.

### 3.1.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Sumatera Selatan, KOR dan Modul Pengeluaran Konsumsi tahun 2018 digunakan untuk membahas hubungan pola konsumsi pangan dengan ketahanan pangan rumah tangga dengan menggunakan tabulasi silang, serta untuk melihat pengaruh karakteristik sosial ekonomi terhadap ketahanan pangan rumah tangga.

### 3.1.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis pada penelitian bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif dengan menggunakan tabel, gambar dan tabulasi silang, sedangkan secara kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrika.

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis pola konsumsi masyarakat Sumatera Selatan dengan menggunakan angka persentase pengeluaran perkapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di daerah perkotaan dan perdesaan; Rata-rata konsumsi per kapita sebulan menurut jenis pengeluaran makanan dan bukan makanan di daerah perkotaan dan perdesaan; serta besarnya konsumsi rata-rata per kapita seminggu terhadap beberapa macam bahan makanan penting di daerah perkotaan dan perdesaan.

Metode atau analisis kuantitatif untuk menganalisis pengaruh karakteristik sosial ekonomi terhadap ketahanan pangan rumah tangga dengan menggunakan model ekonometri.

Model ekonometri ketahanan pangan dikembangkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Noor & Satria (2018), Sari, dkk (2017) Wuryandari (2015), Sundari & Djalal (2015), dan Masykur dkk (2015), yang dinyatakan dalam hubungan fungsi sebagai berikut :

$Y = f(X)$ …… (1)

Y = Ketahanan Pangan

X = Karakteristik Sosial Ekonomi Ketahanan Pangan

$Y = f(X_1, X_2, X_3)$ …….…. (2)

Y menunjukkan ketahanan pangan yang diukur dari besarnya porsi pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga dalam sebulan dalam satuan rupiah.

$X_1$ menunjukkan *Food Availabity* yaitu Ketersediaan Pangan diukur dengan rumah tangga miskin menerima atau tidak menerima bantuan sosial raskin. Skor $X_1$= Raskin = 1, untuk rumah tangga penerima raskin dan skor $X_1$= Raskin = 0, untuk rumah tangga yang tidak menerima raskin;

$X_2$ menunjukkan *Stability* merupakan Kestabilan Ketahanan Pangan diukur dengan variable jumlah anggota keluarga (Fam) yaitu banyaknya anggota keluarga yang ditanggung kepala rumah tangga miskin dalam satuan orang dan variabel pekerjaan kepala rumah tangga (*Work)*. Skor *work* = 1, jika kepala rumah tangga bekerja di sektor formal, dan skor *work* = 0 jika kepala rumah tangga bekerja di sektor informal.

$X_3$ menunjukkan *acces to food* merupakan kemampuan akses terhadap pangan dengan variabel sebagai berikut:

- Pendapatan (*Income*) yang diukur dengan pendapatan kepala rumah tangga dalam sebulan dalam satuan Rupiah.
- Jenis Kelamin (*Gender*) yang diukur dengan jenis kelamin kepala rumah tangga, 1 = laki-laki atau 0 = perempuan.
- Pendidikan (Edu) yang diukur dengan tingkat pendidikan formal kepala rumah tangga yaitu jenjang pendidikan yang ditamatkan dalam satuan tahun.
- Umur (*Age*) yang diukur dengan umur kepala rumah tangga dalam satuan tahun.
- Tipologi wilayah (Daerah tempat tinggal, Reg) yang diukur dari daerah tempat tinggal kepala rumah tangga menurut klasifikasi daerah adalah daerah tempat tinggal rumah tangga yang dikategorikan sebagai perkotaan atau perdesaan dari BPS. 1 = Perkotaan atau 0 = Perdesaan.

Dengan demikian, model ekonometri pengaruh karakteristik social ekonomi ketahanan pangan terhadap ketahanan pangan pada penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 DRaskin + \beta_2 Fam + \beta_3 DWork + \beta_4 Income + \beta_5 DGender + \beta_6 Edu + \beta_7 Age + \beta_8 DReg + \mu_i$$

### 3.1.4 Diagram Alur Penelitian

Keterangan:

1 = Tugas Ketua; 2 = Tugas Anggota 1; 3 = Tugas Anggota 2

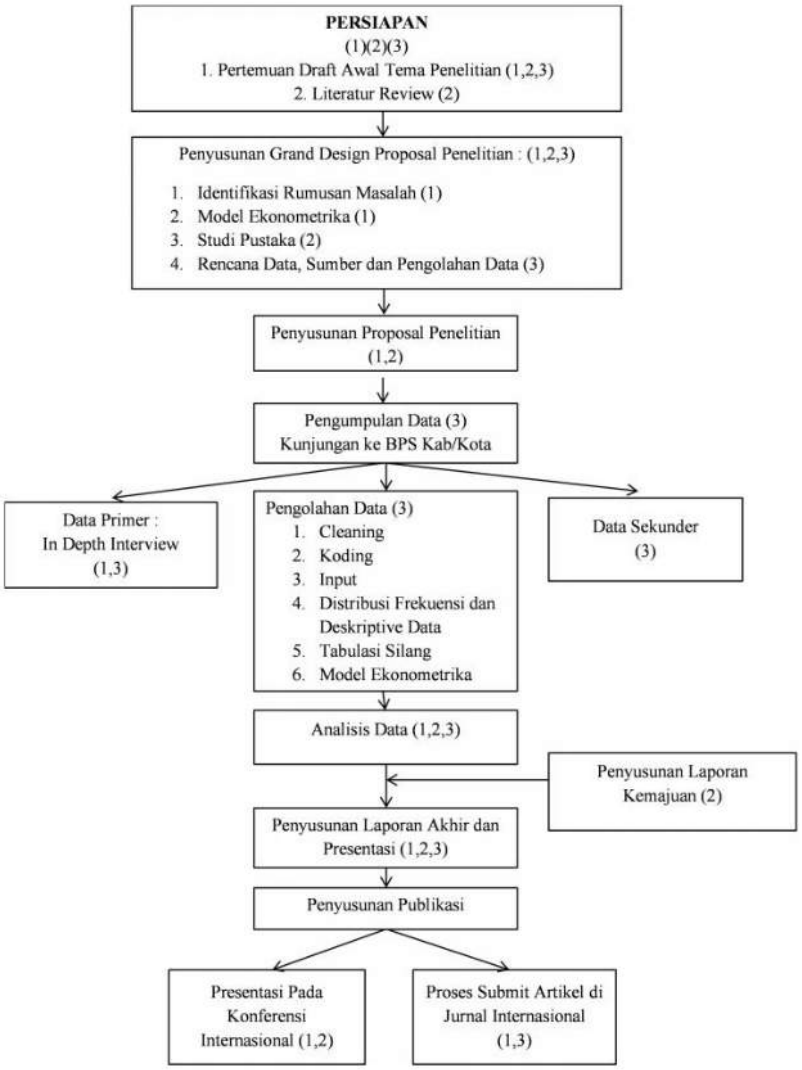


**Gambar 3. 1 Diagram Alur Penelitian**

# 4

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Pola Konsumsi Masyarakat Sumatera Selatan

Setiap tahunnya persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan non makanan masyarakat Sumatera Selatan mengalami fluktuasi. Masyarakat perkotaan lebih banyak mengonsumsi non makanan dibandingkan masyarakat perdesaan dan sebaiknya masyarakat perdesaan lebih banyak mengonsumsi makanan dibandingkan masyarakat perkotaan.

Selama periode 2010 – 2018 konsumsi tertinggi masyarakat perkotaan di Sumatera Selatan untuk makanan terjadi pada tahun 2010, sedangkan untuk konsumsi non makanan di perkotaan yang tertinggi pada tahun 2012.

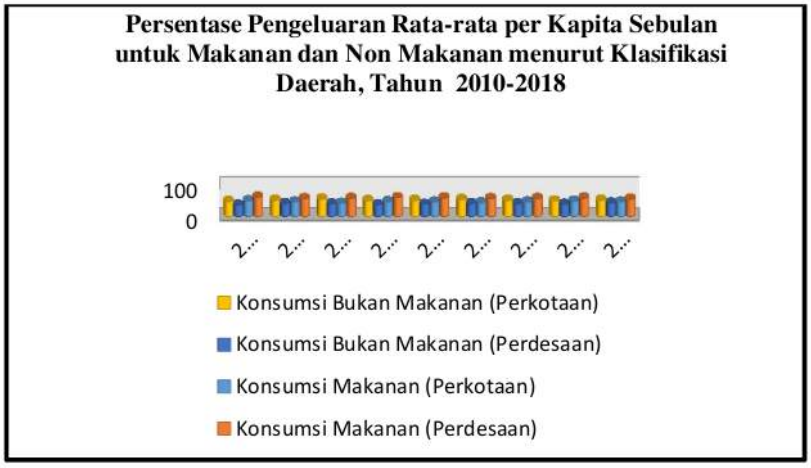


Sumber: Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Sumatera Selatan, BPS

**Gambar 4. 1 Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non MakananTahun 2010-2018**

Dalam periode yang sama yaitu 2010- 2018 pengeluaran konsumsi terendah masyarakat perkotaan di Sumatera Selatan untuk makanan terjadi pada tahun 2012, sedangkan untuk konsumsi non makanan di perkotaan yang terendah pada tahun 2010. Fenomena di perkotaan propinsi Sumatera Selatan ini menunjukkan bahwa selama periode 2010-2018 pengeluaran konsumsi makanan tertinggi yang terjadi pada tahun 2010 terjadi bersamaan dengan konsumsi non makanan terendah.

Di perdesaan selama periode 2010-2018 konsumsi makanan tertinggi terjadi pada tahun 2010, sedangkan konsumsi non makanan tertinggi pada periode yang sama terjadi pada tahun 2018. Apabila dilihat dari besarnya pengeluaran konsumsi makanan di perdesaan selama periode 2010-2018 menunjukkan bahwa pengeluaran terendah

terjadi pada 2018, sedangkan untuk pengeluaran non makanan terendah di perdesaan terjadi pada 2018. Fenomena di perdesaan propinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2018 konsumsi non makanan tertinggi, bersamaan dengan konsumsi makanan terendah.

Pengeluaran konsumsi makanan dapat dikelompokkan berdasarkan komoditinya. Selama periode 2010-2018 komoditi padi-padian relative paling banyak dibeli oleh masyarakat Sumatera Selatan pada setiap tahunnya walaupun dengan persentase pengeluaran konsumsi yang semakin menurun yaitu sebesar 19 persen pada 2010; menjadi sebesar 15 persen pada 2014; dan menjadi 13 persen pada 2018. Tembakau merupakan komoditi yang cukup diminati oleh masyarakat dengan persentase pengeluaran konsumsi yang fluktuatif dari tahun ketahun yaitu sebesar 12 persen pada 2010; menjadi sebesar 15 persen pada 2014; dan menjadi sebesar 14 persen pada 2018. Umbi-umbian merupakan komoditi dengan persentase pengeluaran konsumsi terendah yang dibeli oleh masyarakat pada setiap tahunnya dengan nilai yang konstan yaitu 1 persen di setiap tahun. Selain umbi-umbian persentase pengeluaran konsumsi yang juga konstan yaitu pengeluaran untuk komoditi bumbu-bumbuan ( 2 persen), daging (4 persen) dan buah-buahan (5 persen).

Relatif besarnya pengeluaran untuk komoditi padi-padian dibandingkan umbi-umbian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Sumatera Selatan belum menerapkan diversifikasi pangan, atau dengan kata lain masih mengandalkan padi-padian sebagai makanan pokok.

**Tabel 4. 1 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014**

| Komoditi | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2010 | 2014 | 2018 |
| Tembakau | 12% | 15% | 14% |
| Padi-Padian | 19% | 15% | 13% |
| Umbi-Umbian | 1% | 1% | 1% |
| Ikan/Udang/Cumi Kerang | 10% | 10% | 9% |
| Daging | 4% | 4% | 4% |
| Telur dan Susu | 7% | 8% | 6% |
| Kacang-Kacangan | 2% | 2% | 9% |
| Sayur-Sayuran | 9% | 10% | 9% |
| Buah-Buahan | 5% | 5% | 5% |
| Minyak & Lemak | 4% | 3% | 2% |
| Bahan Minuman | 6% | 4% | 4% |
| Bumbu-Bumbuan | 2% | 2% | 2% |
| Konsumsi Lainnya | 4% | 3% | 2% |

Sumber: Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Sumatera Selatan, BPS

Konsumsi makanan di perkotaan mengalami kenaikan hingga tahun 2016 namun menurun pada tahun 2017 dan kembali naik pada tahun berikutnya. Sedangkan di perdesaan rata-rata konsumsi mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya dengan rata-rata tertinggi pada tahun 2018 serta rata-rata terendah pada tahun 2011. Secara keseluruhan nilai rata-rata konsumsi untuk makanan perdesaan lebih besar dari perkotaan.

Konsumsi rata-rata komoditi umbi-umbian lebih tinggi di perkotaan dari pada perdesaaan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan di Sumatera Selatan lebih suka umbi-umbian dibandingkan masyarakat di perdesaan. Nilai rata-rata pengeluaran untuk komoditi umbi-umbian di perkotaan dan perdesaan tertinggi yaitu pada tahun 2017, sedangkan di kota dan desa rata-rata terendah pada tahun 2012.

Di kota, nilai rata-rata konsumsi ikan/ udang/ cumi/ kerang lebih tinggi dari pada di desa. Relatif tingginya harga udang dan cumi menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan yang mampu membeli komoditi tersebut memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibanding masyarakat di perdesaan. Di kota, nilai rata-rata tertinggi konsumsi ikan/ udang/ cumu/ kerang yaitu pada tahun 2017 dan terendah pada tahun 2011. Berbeda dengan desa, nilai rata-rata tertinggi konsumsi ikan/ udang/ cumu/ kerang yaitu tahun 2017 dan terendah pada tahun 2010.

Rata-rata konsumsi daging di kota jauh lebih tinggi dari pada di desa, banyak faktor yang dapat menyebabkan perbedaan rata-rata konsumsi ini, salah satunya yaitu tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat kota yang lebih tinggi dari di kota. Di kota, rata-rata tertinggi konsumsi daging pada tahun 2017 dan terendah yaitu pada tahun 2011, sedangkan di desa rata-rata terendah yaitu pada tahun 2010.

Di perkotaan konsumsi telur dan susu lebih tinggi dari pada di desa. Namun didesa nilai konsumsi rata-rata telur dan susu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Berbeda dengan kota yang mengalami fluktuasi dengan nilai tertinggi pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2010.

Perbedaan rata-rata konsumsi sayur-sayuran antara kota dan desa tidak terlalu jauh meskipun kota memiliki rata-rata yang lebih rendah. Rata-rata konsumsi keduanya mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Di kota nilai tertinggi yaitu pada tahun 2017 dan terendah pada tahun 2010. Di desa nilai tertinggi yaitu pada tahun 2017 dan terendah pada tahun 2017.

Rata-rata konsumsi kacang-kacangan lebih tinggi di kota daripada di desa. Di kota awalnya nilai rata-ratanya naik secara konstan hingga tahun 2014 dan mulai mengaami fluktuasi di tahun-tahun berikutnya. Begitu juga didesa pada tahun 2014 merupakan tahun dimana dimulainya fuktuasi nilai rata-rata konsumsi kacang-kacangan.

Kota mempunyai rata-rata konsumsi buah yang jauh lebih tinggi dari pada desa. Ini menunjukkan perhatian masyarakat kota terhadap kesehatan. Di kota, nilai rata-rata konsumsi buah berfluktuasi begitu juga di desa. Pada tahun 2018 dan 2010 merupakan nilai rata-rata tertinggi dan terendah di kota dan di desa.

Nilai konsumsi minyak dan lemak di kota dan di desa tidak terlalu berbeda jauh pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Sedangkan pada tahun yang lainnya menunjukkan perbedaan yang cukup jauh. Secara keseluruhan nilai konsumsi minyak dan lemak di desa lebih tinggi.

Di desa konsumsi rata-rata bahan minuman lebih tinggi dari pada di kota. Fluktuasi nilai rata-rata di desa tidak begitu besar berbeda dengan kota. Di kota konsumsi terendah yaitu pada tahun 2012 dan tertinggi pada tahun 2017.

Perbedaan rata-rata konsumsi bumbu-bumbuan di kota dan desa sangat kecil. Di kota awalnya nilai rata-ratanya mengalami

fluktuasi dengan nilai terendah pada tahun 2010 dan tertinggi tahun 2018. Di desa rata-rata konsumsi terus mengalami kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun.

Rata-rata konsumsi lainnya di kota lebih tinggi dari pada di desa. Namun nilai rata-rata di desa dan kota sama-sama mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Di kota dan desa nilai tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan terendah pada tahun 2015. Di desa rata-rata terendah pada tahun 2012.

Terjadi perbedaan rata-rata yang mencolok antara kota dan desa untuk konsumsi makanan dan minuman jadi. Meski keduanya memiliki nilai rata-rata yang berfluktuasi di setiap tahunnya, namun secara umum rata-rata konsumsi makanan dan minuman jadi di kota lebih tinggi dari pada di kota. Adanya perubahan gaya hidup di kota berdampak pada lebih Sukanya masyarakat kota mengonsumsi makanan dan minuman jadi.

Di kota, konsumsi tembakau mengalami penurunan walaupun masih mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Sedangkan, di desa konsumsi tembakau masih lebih tinggi dari pada di kota. Semakin berkembangnya penggunaan rokok elektrik di kota diduga menjadi penyebab penurunan konsumsi tembakau.

Pengeluaran masyarakat Sumatera Selatan untuk non makanan yang memiliki persentasi tertinggi setiap tahunnya yaitu pengeluaran untuk perumahan dan fasiitas rumah tangga, dengan persentase di atas 40 persen terhadap total pengeluaran non makanan. Bahkan pada 2018, pengeluaran ini di atas 50 persen.

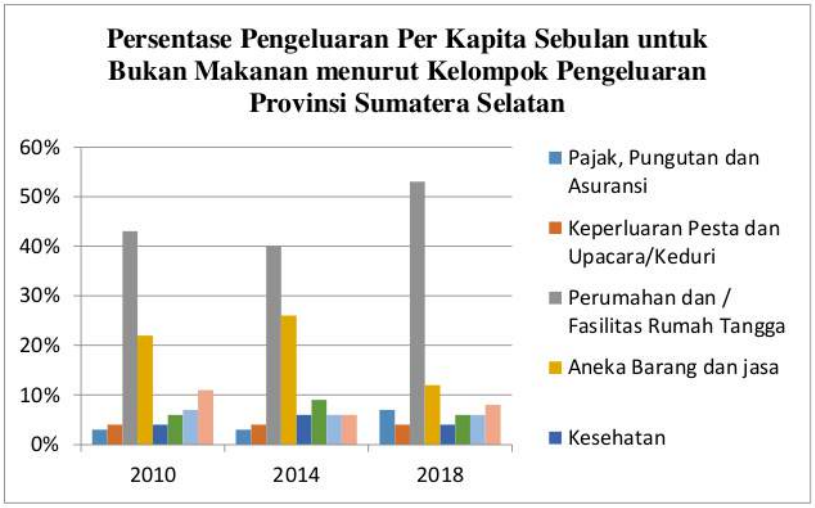


Sumber: Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Sumatera Selatan, BPS.

**Gambar 4. 2 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Non Makanan Tahun 2010-2018**

Persentase tertinggi selanjutnya yaitu pengeluaran untuk aneka barang dan jasa. Pada tahun 2010 dan 2014 pengeluaran ini di atas 20 persen, namun pada 2018 turun menjadi sekitar 12 persen. Persentasi pengeluaran terendah pada tahun 2010 dan 2014 yaitu pengeluaran untuk pajak, pungutan dan asuransi yang besarnya di bawah 10 persen dari total pengeluaran non makanan, sedangkan pada tahun 2018 pengeluaran terendah yaitu untuk keperluan pesta dan upacara dengan nilai yang konstan pada setiap tahunnya, yang besarnya di bawah 5 persen dari total pengeluaran non makanan.

Pengeluaran untuk kesehatan memiliki persentase yang cukup rendah dibandingkan dengan pengeluaran perumahan dan /fasilitas rumah tangga, serta pengeluaran aneka barang dan jasa yaitu di bawah 10 persen dari seluruh pengeluaran non makanan.

Pengeluaran masyarakat kota untuk perumahan dan / fasilitas rumah tangga jauh lebih tinggi dari pada di perdesaan, dengan nilai rata-rata yang berfluktuasi setiap tahunnya. Sementara itu, pengeluaran masyarakat perdesaan masih jauh di bawah kota jika diihat dari nilai rata-rata pertahunnya. Secara lebih rinci besarnya rata-rata konsumsi per kapita sebulan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga dapat dilihat pada Diagram 4.3.

Sumber: Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Sumatera Selatan, BPS.

**Gambar 4. 3 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Tahun 2010-2018**

Selama periode 2010-2018 besarnya pengeluaran perumahan dan / fasiltas rumah tangga baik di kota maupun di desa pada tahun 2010 adalah yang paling rendah yaitu sebesar Rp 110 ribu perkapita sebulan untuk di kota dan sebesar Rp 60 ribu perkapita sebulan untuk di desa. Pengeluaran perumahan dan / fasiltas rumah tangga yang

tertinggi baik di kota maupun di desa terjadi pada tahun 2018 yaitu di atas Rp 300 ribu perkapita sebulan untuk di kota dan di atas Rp 150 ribu perkapita sebulan untuk di desa.

Konsumsi aneka barang dan jasa di daerah perkotaan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 hingga tahun 2014 rata-rata konsumsi kota naik secara konstan hingga pada tahun selanjutnya mengalami penurunan yang cukup tajam. Sedangkan di perdesaan memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dari pada perkotaan dengan nilai yang berfuktuasi di setiap tahunnya.

Selain pengeluaran untuk perumahan dan / fasiltas rumah tangga, yang tergolong pengeluaran non makanan adalah pengeluaran untuk kesehatan (Diagram 4.4.) dan pengeluaran untuk Pendidikan (Diagram 4.5).

Di Sumatera Selatan, pengeluaran perkapita kesehatan di perkotaan jauh lebih besar dari pada di desa. Nilai tertinggi pengeluaran perkapita sebulan untuk kesehatan di kota terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp 45 ribu. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun lain yang rata-rata di bawah Rp 30 ribu per kapita per bulan. Tahun 2010 merupakan tahun dengan pengeluaran perkapita sebulan untuk kesehatan terendah di perkotaaan yaitu sebesar Rp 10 ribu. Di perdesaan perbedaan pengeluaran perkapita sebulan kesehatan tidak terlalu tinggi di setiap tahunnya. Pada tahun 2018 pengeluaran tertinggi sebesar Rp 15.699 dan pada tahun 2010 merupakan tahun dengan pengeluaran perkapita sebulan kesehatan yang terendah Rp 6.826.

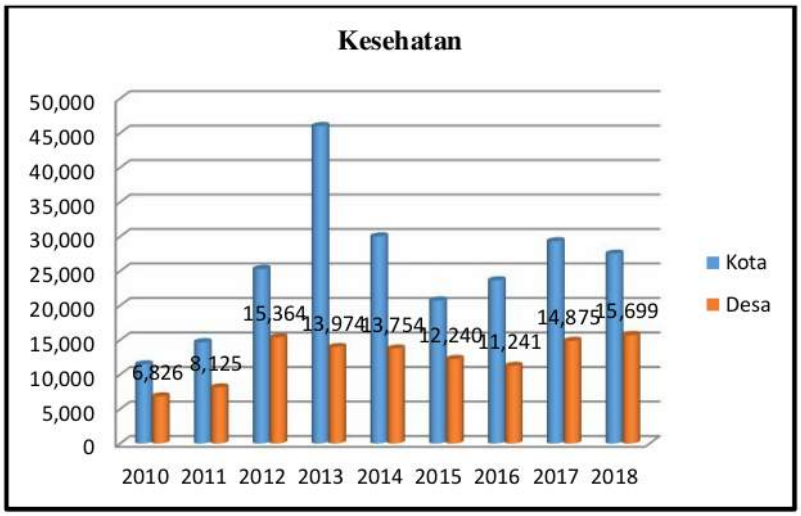


Sumber: Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Sumatera Selatan, BPS.

**Gambar 4. 4 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Kesehatan Tahun 2010-2018**

Pengeluaran perkapita sebulan untuk pendidikan selama periode 2010-2018 berfluktuatif. Baik di kota maupun di desa terjadi peningkatan selama 2010-2014, lalu terjadi penurunan pada 2015, dan meningkat lagi pada 2016-2017, lalu menurun lagi pada 2018. Namun secara umum menunjukkan bahwa kesadaran untuk mengenyam pendidikan di desa masih jauh dibawah masyarakat kota, ditunjukkan oleh pengeluaran perkapita sebulan yang jauh dibawah kota.

Diagram 4.5 menunjukkan bahawa dikota pengeluaran perkapita sebulan untuk kesehatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sekitar Rp 58 ribu, sedangkan di desa pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 19 ribu

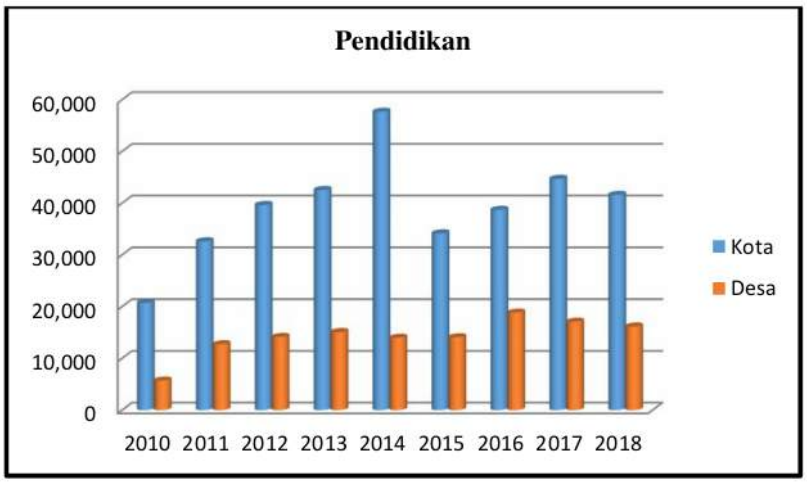


Sumber: Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Sumatera Selatan, BPS.

**Gambar 4. 5 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Pendidikan Tahun 2010-2018**

## 4.2 Ketahanan Pangan Masyarakat Sumatera Selatan

### 4.2.1 Karakteristik Rumah Tangga

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pangsa pengeluaran pangan tinggi yaitu lebih dari 60 persen ditemukan pada 4.502 rumah tangga atau 46.03 persen dari total rumah tangga di Sumatera Selatan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa lebih banyak rumah tangga yang porsi pengeluaran nonpangan lebih besar dibandingkan porsi pengeluaran pangannya. Pada indikator kecukupan kalori dapat pula disimpulkan bahwa 88.3 persen rumah tangga sudah termasuk rumah tangga dengan kalori cukup yaitu lebih dari 1600 kalori/kapita/hari.

**Tabel 4. 2 Distribusi Rumah Tangga di Sumatera Selatan Berdasarkan Pangsa Pengeluaran Pangan dan Kecukupan Kalori**

| Pangsa Pengeluaran Pangan | Jumlah | Persentase (%) | Kecukupan Kalori | Jumlah | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendah | 5230 | 53.7 | Cukup | 8590 | 88.3 |
| Tinggi | 4502 | 46.3 | Kurang | 1142 | 11.7 |
| Total | 9732 | 100.0 | Total | 9732 | 100.0 |

Sumber: Susenas, 2018 (diolah 2019)

Kedua kategori dari masing-masing indikator tersebut ditabulasi silang sehingga menghasilkan empat kategori derajat ketahanan pangan rumah tangga yaitu rumah tangga tahan pangan (kategori 3), rentan pangan (kategori 2), kurang pangan (kategori 1), dan rawan pangan (kategori 0). Untuk lebih jelasnya, pengukuran derajat ketahanan pangan dan pangsa pengeluaran pangan dan ketercukupan kalori dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4. 3 Pengukuran Derajat Ketahanan Pangan Rumah Tangga**

| Ketercukupan Kalori | Pangsa Pengeluaran Pangan | |
|---|---|---|
| | Rendah (<60%) | Tinggi (>60%) |
| Cukup (>80%) | Tahan Pangan (Kategori 3) | Rentan Pangan (Kategori 2) |
| Kurang (<80%) | Kurang Pangan (Kategori 1) | Rawan Pangan (Kategori 0) |

Sumber: Jonsson dan Toole (1991) dalam (Maxwell et all., 2000)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 46.8 persen rumah tangga termasuk kategori Tahan Pangan, 41.4 persen Rentan Pangan dan selebihnya termasuk kategori Kurang dan Rawan Pangan.

**Tabel 4. 4 Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Pengukuran Derajat Ketahanan Pangan Menurut Jhonson dan Toole**

| Pengukuran Derajat Ketahanan Pangan | Jumlah | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Kurang Pangan | 670 | 6.9 |
| Rawan Pangan | 476 | 4.9 |
| Rentan Pangan | 4032 | 41.4 |
| Tahan Pangan | 4554 | 46.8 |
| Total | 9732 | 100.0 |

Sumber: Susenas, 2018 (diolah 2019)

Rumah tangga yang lebih membutuhkan perhatian pemerintah dalam hal perlindungan sosial sebesar 11.8 persen atau sebanyak 1.146 rumah tangga. Namun, ukuran kecukupan kalori dalam penelitian ini sebesar 2.000 kalori/kapita/hari. Jika digunakan ukuran kalori sebesar 2.500 kalori/kapita/hari, maka jumlah rumah tangga dalam kategori Kurang dan Rawan Pangan menjadi lebih banyak.

Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa 25.8 persen atau sebanyak 2.508 rumah tangga memiliki tingkat pendapatan masih di bawah Upah Minimum Regional Propinsi Sumatera Selatan. Rumah tangga terbanyak ada pada kategori tingkat pendapatan sebesar Rp 2 juta – Rp 4.9 juta rupiah yaitu 56,6 persen atau sebanyak 5.504 rumah tangga. Sekitar 17,7 persen rumah tangga memiliki pendapatan lebih besar dari 5 juta rupiah. Secara keseluruhan, rumah tangga di Sumatera Selatan yang memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta sebulan yaitu 8.012 rumah tangga atau 82,4 persen dai total 9.732 rumah tangga. Relatif banyaknya rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah UMP, kiranya perlu mendapat perhatian pemerintah.

**Tabel 4. 5 Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendapatan**

| Pendapatan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| <= Rp 1.999.999 | 2508 | 25.8 |
| Rp. 2.000.000 - Rp 4.999.999 | 5504 | 56.6 |
| Rp. 5.000.000 - Rp 7.999.999 | 1164 | 12.0 |
| Rp 8.000.000 - Rp 10.999..999 | 329 | 3.4 |
| Rp.11.000.000 - Rp 13.999.999 | 110 | 1.1 |
| Rp 14.000.000 - Rp 16.999.999 | 50 | 0.5 |
| Rp.17.000.000 - Rp 19.9999.999 | 23 | 0.2 |
| Rp.20.000.000 - RP 22.999.999< | 44 | 0.5 |
| Total | 9732 | 100% |

Sumber: Susenas, 2018 (diolah 2019)

Berdasarkan status pekerjaan, dapat diketahui bahwa jumlah kepala rumah tangga yang bekerja secara informal meliputi kepala rumah tangga dengan berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/ tidak dibayar sebanyak 5610 orang. Dengan demikian, jumlah rumah tangga dengan status pekerjaan informal sebesar 57,64 persen. Dari jumlah kepala rumah tangga yang bekerja secara informal tersebut, kepala rumah tangga dengan berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, jumlahnya relative besar dengan komposisi masing-masing 26,5 persen (2.576 rumah tangga) dan sebesar 26,0 persen (2.532 rumah tangga)

Kepala rumah tangga bekerja dengan status pekerjaan formal meliputi berusaha dibantu buruh tetap dan buruh, karyawan/pegawai sebanyak 3.132 orang dengan komposisi masing-masing 3,8 persen (372 rumah tangga) dan sebesar 28,4 persen (2.760 rumah tangga).

**Tabel 4. 6 Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Status Pekerjaan**

| Status Pekerjaan | Jumlah | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Berusaha Sendiri | 2576 | 26.5 |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap | 2532 | 26.0 |
| Berusaha dibantu buruh tetap | 372 | 3.8 |
| Buruh/Karyawan/Pegawai | 2760 | 28.4 |
| Pekerja Bebas | 437 | 4.5 |
| Pekerja Keluarga/ Tidak dibayar | 65 | 0.7 |
| Tidak Bekerja | 990 | 10.2 |
| Total | 9732 | 100% |

Sumber: Susenas, 2018 (diolah 2019)

Tabel 4.7 memperlihatkan kepala rumah tangga dalam usia non produktif (lebih dari 56 tahun) sebesar 27.5 persen dan di bawah usia 21 tahun sebesar 0.5 persen. Dengan demikian, lebih dari 72 persen merupakan kepala rumah tangga dalam usia produktif. Usia kepala rumah tangga di bawah rata-rata yaitu 35 tahun sebesar 16.5 persen. Usia berkaitan dengan kemampuan kepala rumah tangga memperoleh pendapatannya. Usia dalam ketegori produktif akan

meningkatkan kemampuan kepala rumah tangga untuk meningkatkan jumlah jam kerjanya sehingga dengan pendapatan yang meningkat akan menentukan besarnya porsi pengeluaran konsumsi pangan dan nonpangan. Tabel 4.6 juga memperlihatkan bahwa 87.9 persen sampel rumah tangga dikepalai oleh laki-laki. Dengan demikian, sebagian besar sampel rumah tangga dikepalai oleh laki-laki sehingga kemampuan akses terhadap pangan lebih tinggi.

**Tabel 4. 7 Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Usia Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin**

| Usia Kerja/ | Jumlah | Persentase (%) |
|---|---|---|
| < 20 | 44 | 0.5 |
| 21 - 27 | 333 | 3.4 |
| 28 - 34 | 1223 | 12.6 |
| 35 - 41 | 1911 | 19.6 |
| 42 - 48 | 1906 | 19.6 |
| 49 - 55 | 1637 | 16.8 |
| 56 - 62 | 1275 | 13.1 |
| 63> | 1403 | 14.4 |
| Rata-rata | 35 tahun | |
| Gender | Jumlah | Persentase (%) |
| Perempuan | 1179 | 12.1 |
| Laki-laki | 8553 | 87.9 |
| Total | 9732 | 100% |

Sumber: Susenas, 2018 (diolah 2019)

Berdasarkan tingkat pendidikan, dapat diketahui bahwa kepala rumah tangga dengan pendidikan tinggi hanya sebesar 5.6 persen atau sebanyak 547 orang, sebanyak 9185 kepala rumah tangga memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah. Lebih besarnya sampel rumah tangga dengan pendidikan menengah ke bawah, dapat terjadi karena 68.3 persen sampel merupakan rumah tangga yang tinggal perdesaan.

**Tabel 4. 8 Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Tidak Tamat SD | 2205 | 22.7 |
| SD | 3200 | 32.9 |
| SMP | 1627 | 16.7 |
| SMA | 2153 | 22.1 |
| Diploma | 127 | 1.3 |
| Sarjana | 352 | 3.6 |
| Pascasarjana/Doktor | 68 | 0.7 |
| Total | 9732 | 100% |

Sumber: Susenas, 2018 (diolah 2019)

**Tabel 4. 9 Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Penerima atau Tidak Menerima Program Perlindungan Sosial**

| Program Perlindungan Sosial | Jumlah | Persentase (%) | Wilayah | Jumlah | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Menerima Program | 8187 | 84.1 | Perdesaan | 6643 | 68.3 |
| Penerima Program | 1545 | 15.9 | Perkotaan | 3089 | 31.7 |
| Total | 9732 | 100% | Total | 9732 | 100% |

Sumber: Susenas, 2018 (diolah 2019)

Dari sampel sebanyak 9732 kepala rumah tangga terdapat 15.9 persen rumah tangga yang mendapatkan program Perlindungan Sosial dari pemerintah meliputi Program Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra), Kartu perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan.

## 4.3 Pembahasan

### 4.3.1. Pola Konsumsi Masyarakat Sumatera Selatan

Pola konsumsi masyarakat Sumatera Selatan menunjukkan fenomena bahwa di perkotaan pada tahun 2010 konsumsi makanan adalah tertinggi, bersamaan dengan konsumsi non makanan terendah. Sementara itu di perdesaan propinsi Sumatera Selatan menunjukkan

bahwa pada tahun 2018 konsumsi non makanan tertinggi, bersamaan dengan konsumsi makanan terendah.

Konsumsi makanan di perkotaan mengalami kenaikan hingga tahun 2016 namun menurun pada tahun 2017 dan kembali naik pada tahun berikutnya. Sedangkan di perdesaan rata-rata konsumsi mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya dengan rata-rata tertinggi pada tahun 2018 serta rata-rata terendah pada tahun 2011. Secara keseluruhan nilai rata-rata konsumsi perdesaan lebih besar dari perkotaan.

Fenomena menarik ditemui pada pola konsumsi rata-rata komoditi umbi-umbian yang lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaaan. Nilai rata-rata perkotaan dan desa tertinggi yaitu pada tahun 2017 , sedangkan di kota dan desa rata-rata terendah pada tahun 2012.

Demikian juga untuk rata-rata konsumsi daging di kota jauh lebih tinggi dari pada di desa. Banyak faktor yang dapat menyebabkan perbedaan rata-rata konsumsi ini, salah satunya yaitu tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat kota yang lebih tinggi dari di kota. Di kota rata-rata tertinggi pada tahun 2017 dan terendah yaitu pada tahun 2011, sedangkan di desa rata-rata terendah yaitu pada tahun 2010.

Pengeluaran masyarakat Sumatera Selatan untuk non makanan yang memiliki persentasi tertinggi setiap tahunnya yaitu pengeluaran untuk perumahan dan fasiitas rumah tangga, dengan persentase di atas 40 persen terhadap total pengeluaran non makanan.

Pengeluaran masyarakat kota untuk perumahan dan fasiitas rumah tangga jauh lebih tinggi dari pada di perdesaan, dengan nilai

rata-rata yang berfluktuasi setiap tahunnya, demikian juga untuk pengeluaran konsumsi aneka barang dan jasa; pengeluaran kesehatan; dan pengeluaran Pendidikan

### 4.3.2. Ketahanan Pangan Masyarakat Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil estimasi secara simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variable ketahanan pangan.

Jika dilihat dari Tabel 4.10, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari alpha yaitu di bawah 0,05 persen kecuali variabel usia (*Age*) dan status pekerjaan (*Work*). Artinya, setiap variabel independen tersebut kecuali variable usia (*Age*) dan status pekerjaan (*Work*) mempengaruhi variable dependen yaitu ketahanan pangan secara signifikan.

**Tabel 4. 10 Hasil Estimasi Regresi Berganda Model Tingkat Ketahanan Pangan**

| Variabel | Parameter Estimasi | Probabilitas | Signifikansi |
|---|---|---|---|
| Konstanta | 60.409 | 0.000 | |
| Sosial | 2.388 | 0.000 | |
| Fam | 2.095 | 0.000 | |
| Income | -1.915E-6 | 0.000 | |
| Gender | 1.753 | 0.000 | |
| Edu | -.582 | 0.000 | |
| Age | -.011 | 0.200 | |
| Reg | -2.288 | 0.000 | |
| Work | .356 | 0.117 | |

Sumber: Susenas 2018, Data Diolah 2019

Tabel 4.10 dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

Y = 60,409 + 2,388 Sosial + 2,095 Fam - 1.915E-6 Income + 1.753 Gender – 0,582 Edu - 0,11 Age - 2,288Reg + 0,356 Work

Dari enam variabel independen yang diamati, maka variabel yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan yaitu variabel sosial yang menunjukkan *food availability*, memberikan pengaruh dominan. Nilai signifikan pada variable social menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh antara rumah tangga penerima program perlindungan social dari pemerintah dengan rumah tangga yang tidak menerima. Terlihat bahwa pada rumah tangga penerima program perlindungan sosial lebih tahan pangan dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak menerima.

Variabel jumlah tanggungan (Fam) yang menggambarkan *food stability,* menunjukkan pengaruh positif. Semakin besar jumlah tanggungan rumah tangga maka semakin besar pula porsi pengeluaran pangan rumah tangga.

Ketahanan pangan yang dilihat dari *acces to food* dapat dilihat dari variabel pendapatan *(Income)* berpengaruh siginifikan tapi pengaruhnya sangat kecil. Variabel selanjutnya yaitu gender yang juga signifikan mempengaruhi ketahanan pangan, yaitu pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki lebih tinggi tingkat ketahanan pangannya dibandingkan kepala rumah tangga perempuan.

Variabel tipologi wilayah (Reg) menunjukkan perbedaan pengaruh antara rumah tangga yang tinggal di perdesaan dengan perkotaan. Pada rumah tangga yang tinggal di perkotaan, tingkat ketahanan pangannya lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang tinggal di wilayah perdesaan. Porsi pengeluaran pangan

dibandingkan total pengeluaran pada rumah tangga perkotaan lebih rendah dibandingkan perdesaan. Rumah tangga perkotaan pengeluarannya lebih besar pada pengeluaran nonpangan, sebaliknya pengeluaran konsumsi rumah tangga perdesaan lebih besar untuk pengeluaran pangan.

Tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka porsi pengeluaran pangan semakin rendah sehingga tingkat ketahanan pangannya semakin baik.

# 5

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 5.1 Kesimpulan

Pola konsumsi masyarakat Sumatera Selatan menunjukkan fenomena bahwa di perkotaan pada tahun 2010 konsumsi makanan adalah tertinggi, bersamaan dengan konsumsi non makanan terendah. Sementara itu di perdesaan propinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2018 konsumsi non makanan tertinggi, bersamaan dengan konsumsi makanan terendah.

Rumah tangga di Sumatera Selatan yang termasuk dalam kategori Tahan Pangan sebesar 46,8 persen. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga menjadi lebih tahan pangan jika pendapatan rumah tangga lebih besar, jumlah tanggungan rumah tangga lebih sedikit, pendidikan kepala rumah tangga lebih tinggi, pekerjaan kepala rumah tangga pada sektor formal, dan tinggal di kawasan perkotaan. Berdasarkan tiga indikator

ketahanan pangan, maka indikator *food availability* yaitu variabel menerima atau tidak menerima program perlindungan social merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Selanjutnya, variable yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga yaitu jumlah tanggungan rumah tangga sebagai indikator *food stability*. Dari indicator *acces to food* terlihat bahwa rumah tangga yang tinggal di perdesaan tingkat ketahanan pangannya lebih rendah daripada rumah tangga perkotaan.

## 5.2 Rekomendasi

Program perlindungan sosial dari pemerintah perlu dilanjutkan, karena ada banyak rumah tangga yang tidak dalam kondisi tahan pangan yaitu sebesar 53,2 persen. Pemberian Program Raskin sebaiknya diprioritaskan bagi rumah tangga yang tinggal di kawasan perdesaan dan dengan kepala rumah tangga perempuan. Selain itu, jumlah tanggungan keluarga sebagai variable kedua terbesar pengaruhnya terhadap ketahanan pangan, maka pemerintah sebaiknya menerapkan Program Keluarga Berencana untuk mendukung Program Ketahanan Pangan. Selain itu, sebaiknya pendidikan juga ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Raskin sebaiknya diprioritaskan pula bagi rumah tangga yang memiliki tanggungan anggota keluarga yang banyak dan dengan tingkat pendapatan rendah agar kestabilan ketahanan pangan dan kemampuan akses terhadap pangan meningkat.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdillah, John Jaya., Wiyono, Vincent Hadi., Samudro, Bhimo Rizky. (2019). Analisis Pola Konsumsi dan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Research Fair Unisri 2019*, 3(1), 1–7.

Armar-klemesu, M., & Ahiadeke, C. (2000). *Urban Livelihoods and Food and Nutrition Security in Greater Accra , Ghana*. Washington DC.

Assegaf. (2015). *Konsep Kesejahteraan dan Problematika Kemiskinan Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program BLT*. Malang: Intrans Publishing.

Bashir, A., & Yuliana, S. (2018). Identifying Factors Influencing Rice Production and Consumption in Indonesia, 19(2), 172–185. https://doi.org/10.23917/jep.v19i2.5939

Bhakti, N., A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 18(4), 452–469.

BPS. (2016). *Buku 1. Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Tahun 2016*.

BPS. (2016). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016*. (2016)

*BPS ( 2017). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017*. (2017).

Deaton, A., & Dreze, J. (2010). Nutrotion, Poverty and Calorie Fundamentalism: Response to Utsa Patnaik. *Economic and Poitical Weekly*, 45(14), 78–80.

Huda, N. (2008). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana.

Ilham, N., & Bonar, (2007). Penggunaan Pangsa Pengeluaran Pangan Sebagai Indikator Komposit Ketahanan Pangan. *SOCA (Journal on Socio Economics of Agriculture)*, 7(3), 1–22.

Etavianti., Syechalad, Mohd Nur., Syahnur Sofyan. (2014). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Kesehatan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(4), 65–75.

Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Langsa, D. K. (2017). Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 127–134.

Lincoln, A. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mankiw, G. N. (2003). *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mankiw, N.G. (2007). *Mankiw N.G. Makroekonomi*. Jakarta:

Erlangga.

Mayasari, D., Satria, D., & Noor, I. (2018). Analisis Pola Konsumsi Pangan Berdasarkan Status IPM di Jawa Timur The Pattern of Food Consumption Based on HDI in East Java Pendahuluan. *JIEP*, 18(2), 191–213.

Mulyana, A., & Yamin, M. (2015). Analisis Pola Konsumsi Pangan Di Sumatera Selatan 2013 : Pendekatan Quadratic Almost Ideal Demand System Analysis of Food Consumption Patterns in South Sumatra in 2013 : A Quadratic Almost Ideal Demand System Approach. *Jurnal Agro Ekonomi*, *33*(2), 123–140.

Nasikun. (2002). *Jurnal ILmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 1–16.

Nicholson, W. (1994). *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mayasari, Dewi., Noor, I., & Satria, D. (2018). Analisis Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Miskin di Provinsi Jawa Timur. *JIEP*, 18(1), 35–52. https://doi.org/10.20961/jiep.v18i1.16658

Sari, Haifa., Syahnur, Sofyan., Seftarita, Chenny. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rokok pada Rumah Tangga Miskin di Provinsi Aceh. Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam, 3(2), 117–133.

Pangaribowo, E. H. (2011). Consumption Behavior of the Poorest and Policy in Indonesia. *ZEF-Discussion Papers on Development Policy*, (151). https://doi.org/10.1007/978-94-007-7061-4

Rahardja, Prathama dan Manurung, M. (2004). *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia.

Regression, P. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 202–216.

Rini, A. S., Sugiharti, L., & Airlangga, U. (2016). Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 01(2), 17–33.

Masykur, Syechalad, Moh.Nur, Nasir, Muhammad.(2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Miskin DI Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *3*(3), 33–42.

Sari, N. A. (2016). Analisis Pola Konsumsi Pangan Daerah Perkotaan dan Pedesaan Serta Keterkaitannya Dengan Karakteristik Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. *JEMI*, 16(2), 69–81.

Subandi. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (2006). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sundari, I., & Djalal, N. (2015). Analisis Raskin dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia Raskin Analysis and Household Food Security in Indonesia (Susenas 2011 Data Analysis), *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(2), 121–143.

Widarjono, A. (2013). Food Demand In Yogyakarta : SUSENAS 2011. *KINERJA*, 17(2), 104–118.

Wulandari, N. R., Harafah, H. LM., dan Saenong, Zainuddin. (2016).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kota Kendari Tahun 2014. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 111–119.

Wuryandari, R., D., (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Makanan , Pendidikan , dan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (Analisis Data Susenas 2011) Determinants Of Household Expenditures On Food , Education and Health in Indonesia Using The 2011 Susenas Data. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(1), 27–42.

Drs. Muhammad Teguh, M.Si,. Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (1987); S2 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Bidang Ekonomi Industrl (2003).

Buku yang sudah diterbitkan :

1. Metode penelitian ekonomi; Teori dan Aplikasi (2005), Penerbit Percetakan Raja Grafindo Persada,
2. Matematiak Ekonomi (2014), Penerbit Percetakan Raja Grafindo Persada,
3. Metode Kuantitatif Untuk Ekonomi dan Bisnis (2014), Penerbit Percetakan Raja Grafindo Persada,
4. Ekonomi Industri (2010), Penerbit Percetakan Raja Grafindo Persada.

Deassy Apriani, S.E., M.Si, lahir di Kota Palembang 9 April 1991. Menjadi Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sejak tahun Agustus 2017. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Jurusan Ekonomi Pembangunan (2013); S2 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, bidang kajian utama Perbankan dan Keuangan Islam (2016).

Surveyor pada kegiatan Penyusunan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (2017); surveyor pada Kajian Sumberdaya Alam terkait Investasi di Kabupaten Muara Enim (2015).

Karya Ilmiah "*Revealed Comparative Advantage In Indonesian Coffee Commodity In The International Market*" dimuat di SEABC 2019"; "Kinerja Industri Pengupasan, Pembersihan Dan Sortasi Kopi Di Indonesia dimuat di Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP FE UNSRI) 2018"; "*The Analysis of Potential Funding of Islamic Social Reporting and the Factors that Effect of Islamic Social Reporting on Islamic Bank in Indonesia*" dimuat pada *Proceeding* 2nd *Sriwijaya Economics Accounting and Business Conference* (2016).

**Dr. Sa'adah Yuliana, S.E., M.Si,** lahir di Surakarta, 27 Juli tahun 1964. Menjadi Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sejak tahun 1990. Menempuh Pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (1988); S2 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, bidang kajian utama Ekonomi Sumberdaya Manusia (2000); S3 pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, bidang kajian utama Ekonomi dan Keuangan Islam (2013).

Mantan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan (2003-2007) ini pernah sebagai pengelola Jurnal Kajian Ekonomi pada Program Pascasaraja Universitas Sriwijaya (2003-2004) dan Jurnal Ekonomi Pembangunan pada Jurusan Ekonomi Pembangunan (2004-2009). Saat ini sebagai Koordinator Laboratorium Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijay

Beberapa tulisan antara lain : Effect of Investment on Employment in the Formal Small Industries in the District/ City of South Sumatera Province, Indonesia (Ketua Tim – 2018) dimuat pada International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 8, No.1 ISSN: 2146-4138). Identifying Factors Influencing Rice Production and Consumption in Indonesia (anggota Tim – 2018) dimuat pada Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.16 , No.2, ISSN: 2549-4333 dan e-ISSN : 2549-4333). Comparative Analysis of Profit Sharing Financing Between Islamic Banks (BUS) and Islamic Rural bank (BPRS) in Indonesia (Ketua Tim – 2017) dimuat pada International Journal of Economics and Fiancial Issues Vol.7, No.2, ISSN: 2146-4138. Conceptual Design in Building Internationalization in Higher Education Industry as a Form of Economic Upgrading (Anggota Tim – 2017) dimuat pada Advanced Social Letters Vol.23, No.9, ISSN: 1936-6612 dan e-ISSN: 1936-7317, serta menjadi anggota tim penulis buku Pembangunan Berkelanjutan-Interaksi Desa Kota- Rural Urban Fringe (2017) dan buku Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (2017).

**Imelda , S.E., M.S.E,** lahir di Palembang 9 Maret 1977. Menjadi Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sejak Desember tahun 2009. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Jurusan Ekonomi Pembangunan (2000); S2 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Indonesia, bidang kajian utama Ekonomi Regional dan Perkotaan (2006). Menjabat Kepala Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis FE UNSRI sejak tahun 2011-Sekarang. Konsultan Ahli dalam kajian potensi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin (2017); Surveyor pada kegiatan Penyusunan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (2017) ; Konsultan Ahli dalam penyusunan data base kemiskinan Ogan Komering Ilir (2015); Karya Ilmiah "Capitability and Development of Paying Waste Management Towards Rumid Enviromental Improvement In Palembang City Growth Center (2019) dimuat di Sriwijaya International Journal Of Dynamic Economic And Business".

ISBN 978-979-587-638-4

9 789795 878384

Drs. Muhammad Teguh, M.Si,. Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (1987); S2 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Bidang Ekonomi Industrl (2003).

Buku yang sudah diterbitkan :

1. Metode penelitian ekonomi; Teori dan Aplikasi (2005), Penerbit Percetakan Raja Grafindo Persada,
2. Matematiak Ekonomi (2014), Penerbit Percetakan Raja Grafindo Persada,
3. Metode Kuantitatif Untuk Ekonomi dan Bisnis (2014), Penerbit Percetakan Raja Grafindo Persada,
4. Ekonomi Industri (2010), Penerbit Percetakan Raja Grafindo Persada.

Deassy Apriani, S.E., M.Si, lahir di Kota Palembang 9 April 1991. Menjadi Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sejak tahun Agustus 2017. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Jurusan Ekonomi Pembangunan (2013); S2 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, bidang kajian utama Perbankan dan Keuangan Islam (2016).

Surveyor pada kegiatan Penyusunan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (2017); surveyor pada Kajian Sumberdaya Alam terkait Investasi di Kabupaten Muara Enim (2015).

Karya Ilmiah *"Revealed Comparative Advantage In Indonesian Coffee Commodity In The International Market"* dimuat di SEABC 2019"; "Kinerja Industri Pengupasan, Pembersihan Dan Sortasi Kopi Di Indonesia dimuat di Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP FE UNSRI) 2018"; *"The Analysis of Potential Funding of Islamic Social Reporting and the Factors that Effect of Islamic Social Reporting on Islamic Bank in Indonesia"* dimuat pada *Proceeding 2nd Sriwijaya Economics Accounting and Business Conference* (2016).

# POLA KONSUMSI DAN KETAHANA PANGAN MASYARAKAT SUMATERA SELATA (ANALISIS DATA SUSENAS)

ORIGINALITY REPORT

| 8% | 8% | 2% | 2% |
|---|---|---|---|
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

15%

★ media.neliti.com

Internet Source

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exclude quotes | On | Exclude matches | < 2% |
| Exclude bibliography | On | | |